

PERKEMBANGAN EKONOMI DAN KEBIJAKAN MAKRO EKONOMI

Asep Ahmad Saefuloh

Tinjauan atas perekonomian Indonesia dalam kurun waktu 1945-2010, terdapat berbagai pembabakan. Tetapi kesamaan biasanya dilihat berdasarkan Orde Lama, Orde Baru dan Era Reformasi. Pembabakan di Orde Lama menggunakan berdasarkan Demokrasi Terpimpin, Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin. Perbedaan pembabakan biasanya muncul dalam pembabakan pada Orde Baru. Untuk Orde baru dapat melihat pada Studi dari Koesmawan (2004) yang membagi dalam Dekade 1970-1980, Dekade 1980-1990, dan Dekade 1990-2000.

Demokrasi Terpimpin

Masa awal kemerdekaan (1945-1950), keadaan ekonomi keuangan amat buruk. Penyebabnya adalah inflasi yang sangat tinggi yang disebabkan karena beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali,¹ adanya blokade ekonomi yang dilakukan oleh Belanda sejak bulan November 1945 dengan tujuan menutup pintu perdagangan luar negeri RI, kas negara kosong, dan dampak eksploitasi besar-besaran di masa penjajahan. Pada waktu usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan ekonomi, antara lain: *pertama*, melukan Program Pinjaman Nasional dilaksanakan oleh Menteri Keuangan Ir. Surachman dengan persetujuan BP-KNIP yang dilakukan pada bulan Juli 1946; *kedua*, melakukan langkah menembus blokade dengan diplomasi beras ke India, mengadakan kontak dengan perusahaan swasta Amerika, dan menembus blokade Belanda di Sumatera dengan tujuan ke Singapura dan Malaysia; *ketiga*, melakukan Konferensi Ekonomi Februari 1946 dengan tujuan untuk memperoleh kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak yaitu masalah produksi dan distribusi makanan, masalah sandang, serta status dan administrasi perkebunan-perkebunan; *keempat*, Pembentukan *Planning Board* (Badan Perancang Ekonomi) 19 Januari 1947 Rekonstruksi dan Rasionalisasi *Angkatan Perang* (Rera) 1948, mengalihkan tenaga bekas angkatan perang ke bidang-bidang produktif; *keempat*, menyusun Kasimo Plan yang intinya mengenai usaha swasembada pangan dengan beberapa petunjuk pelaksanaan yang praktis dengan harapan swasembada pangan akan mendorong perekonomian akan membaik.

Masa Demokrasi Liberal (1950-1957)

Kurun waktu 1950-1957, disebut masa liberal karena dalam politik maupun sistem ekonominya menggunakan prinsip-prinsip liberal. Perekonomian diserahkan pada pasar sesuai teori-teori mazhab klasik yang menyatakan *laissez faire laissez passer*. Meskipun saat itu, pengusaha pribumi masih lemah dan belum bisa bersaing dengan pengusaha

¹ Pada waktu itu, untuk sementara waktu pemerintah RI menyatakan tiga mata uang yang berlaku di wilayah RI, yaitu mata uang *De Javasche Bank*, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang. Kemudian pada tanggal 6 Maret 1946, Panglima AFNEI (*Allied Forces for Netherlands East Indies*/pasukan sekutu) mengumumkan berlakunya uang NICA di daerah-daerah yang dikuasai sekutu. Pada bulan Oktober 1946, pemerintah RI juga mengeluarkan uang kertas baru, yaitu ORI (Oeang Republik Indonesia) sebagai pengganti uang Jepang. Berdasarkan teori moneter, banyaknya jumlah uang yang beredar mempengaruhi kenaikan tingkat harga.

nonpribumi, terutama pengusaha Cina. Akhirnya sistem ini hanya memperburuk kondisi perekonomian Indonesia yang baru merdeka. Berbagai usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi masalah ekonomi, antara lain:

1. Gunting Syarifuddin, yaitu pemotongan nilai uang (*sanering*) pada 20 Maret 1950, untuk mengurangi jumlah uang yang beredar agar tingkat harga turun.
2. Program Benteng (Kabinet Natsir), yaitu upaya menumbuhkan wiraswastawan pribumi dan mendorong importir nasional agar bisa bersaing dengan perusahaan impor asing dengan membatasi impor barang tertentu dan memberikan lisensi impornya hanya pada importir pribumi serta memberikan kredit pada perusahaan-perusahaan pribumi agar nantinya dapat berpartisipasi dalam perkembangan ekonomi nasional. Program ini gagal, karena sifat pengusaha pribumi yang cenderung konsumtif dan tak bisa bersaing dengan pengusaha non-pribumi.
3. Nasionalisasi *De Javasche Bank* menjadi Bank Indonesia pada 15 Desember 1951 melalui UU No.24 th 1951 dengan fungsi sebagai bank sentral dan bank sirkulasi.
4. Sistem ekonomi Ali-Baba (kabinet Ali Sastroamijoyo I) yang diprakarsai Mr Iskak Cokrohadisuryo, yaitu penggalangan kerjasama antara pengusaha Cina dan pengusaha pribumi. Pengusaha non-pribumi diwajibkan memberikan latihan-latihan pada pengusaha pribumi, dan pemerintah menyediakan kredit dan lisensi bagi usaha-usaha swasta nasional. Program ini tidak berjalan dengan baik karena pengusaha pribumi kurang berpengalaman sehingga hanya dijadikan alat untuk mendapatkan bantuan kredit dari pemerintah.
5. Pembatalan sepihak atas hasil-hasil Konferensi Meja Bundar, termasuk pembubaran Uni Indonesia-Belanda. Akibatnya banyak pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya sedangkan pengusaha-pengusaha pribumi belum bisa mengambil alih perusahaan-perusahaan tersebut.

Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1967)

Adanya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, secara langsung menjadikan Indonesia mempraktekkan sistem demokrasi terpimpin dan struktur ekonomi Indonesia menjurus pada sistem etatisme yaitu segala-galanya diatur oleh pemerintah. Berdasarkan sistem ini diharapkan akan membawa pada kemakmuran bersama dan persamaan dalam sosial, politik, dan ekonomi sesuai dengan Mazhab Sosialisme. Akan tetapi, kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah pada waktu itu belum mampu memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia, antara lain:

1. Adanya kebijakan devaluasi yang diumumkan pada 25 Agustus 1959 yaitu menurunkan nilai uang kertas pecahan Rp 500 menjadi Rp 50, uang kertas pecahan Rp 1000 menjadi Rp 100, dan semua simpanan di bank yang melebihi 25.000 dibekukan.
2. Pembentukan Deklarasi Ekonomi (Dekon) untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin. Dalam pelaksanaannya justru mengakibatkan stagnasi bagi perekonomian Indonesia. Bahkan pada 1961-1962 harga barang-barang melonjak naik 400%.
3. Devaluasi yang dilakukan pada 13 Desember 1965 menjadikan uang senilai Rp 1000 menjadi Rp 1. Sehingga uang rupiah baru mestinya dihargai 1000 kali lipat uang rupiah lama, tapi di masyarakat uang rupiah baru hanya dihargai 10 kali lipat

lebih tinggi. Maka tindakan pemerintah untuk menekan angka inflasi ini malah meningkatkan angka inflasi. Kegagalan-kegagalan dalam berbagai tindakan moneter itu diperparah karena pemerintah tidak menghemat pengeluaran-pengeluarannya. Pada masa itu pemerintah membuat banyak proyek-proyek mercusuar, dan juga sebagai akibat politik konfrontasi dengan Malaysia dan negara-negara Barat. Ini juga salah satu konsekuensi dari pilihan menggunakan sistem demokrasi terpimpin yang bisa diartikan bahwa Indonesia berkiblat ke Timur (sosialis) baik dalam politik, ekonomi, maupun bidang-bidang lain.

Dekade 1970-1980

Perkembangan ekonomi dalam dekade 1970-1980 dapat merujuk pada Studi Koesmawan, dimana pada periode tersebut menunjukkan:

1. Pertumbuhan sektor ekonomi bervariasi tetapi secara umum sektor pertanian terus memberikan kontribusi yang bertambah kepada PDB dengan rata-rata 6.01% dan terjadi lonjakan produksi tahun 1973 mencapai 29,5%. Jumlah produksi rata-rata tiap tahun mencapai Rp. 29.655,42 milyar.
2. Sektor industri, pada dekade ini juga tumbuh dengan pertumbuhan mencapai rata-rata 12.35%. Meskipun ecepatan pertumbuhannya melebihi sektor pertanian, ternyata pada dekade ini belum bisa melampaui hasil pertanian. Kontribusi sektor industri terhadap PDB terus meningkat terus dari 9% ke 14%.
3. Kontribusi jasa-jasa di luar jasa perdagangan dan pertambangan terhadap PDB relatif tetap setiap tahun yaitu antara 9-10%.
4. Kontribusi variabel lain, seperti pertambangan dan penggalian listrik, gas dan air bersih, bangunan, hotel restoran dan jasa keuangan lainnya, kontribusinya kepada PDB relatif kurang lebih 50% dan mampun bertahan cukup lama.
5. Pendapatan per kapita cukup tinggi mencapai US \$2.233 pada tahun 1977, dengan rata-rata selama dekade ini sebesar US \$ 1898.70, dan angka ini tertinggi dibandingkan pada dua dekade terakhir.
6. Pertumbuhan pemberian kredit kepada swasta terus meningkat, seiring dengan gerak laju pembangunan secara umum dengan mencapai rata-rata 22,16% pertahun.
7. Investasi secara nominal bertambah, namun prosentase pertumbuhannya menurun terus, dengan rata-rata dalam dekade tersebut mencapai Rp. 18.567,35 milyar. Sementara pertumbuhan tertinggi hanya terjadi tahun 1970-1971 sebesar 21%, sedangkan rata-rata pertumbuhan pada dekade tersebut sebesar 7,84% saja.
8. Rata-rata upah yang tercatat mencapai angka Rp. 400.000-1.000.000 pada sektor pemerintah, sedangkan sektor swasta antara Rp. 100.000-200.000.

Pada dekade tersebut² dibuat kebijakan ekonomi pada Sektor Perbankan. Secara kelembagaan, *market entry* ditutupi dan dibatasi, ijin bank baru ditutup sejak awal

² Pada kurun waktu ini, ada beberapa peristiwa penting, antara lain terselenggaranya Pemilu tahun 1971 dengan 10 partai, dan merupakan pemilu pertama di Masa Pemerintahan Soeharto. Kemudian terselenggara juga pemilu 1977 yang akhirnya mengekalkan jabatan presiden Soeharto. Pada dekade tersebut pernah terjadi goncangan Peristiwa Malari 15 Januari 1975, tetapi tidak begitu mengganggu pemerintahan Soeharto. Berikutnya, terjadi aksi mahasiswa tahun 1978, di mana kampus ITB di duduki tentara, tetapi peristiwa ini juga tidak meruntuhkan Soeharto. Peristiwa-peristiwa tersebut, kaitannya dengan perekonomian ternyata pada tahun-tahun kejadian banyak posisi menguntungkan

dasawarsa 1970-an, lokasi kantor cabang serta operasi bank asing dibatasi hingga wilayah administratif DKI Jakarta Raya saja. Untuk meningkatkan skala ekonomi bank-bank swasta nasional mereka dirangsang untuk melakukan merger, dan Bank-bank negara melakukan ekspansi jaringan kantor cabang ke seluruh pelosok tanah air untuk dapat menyalurkan kredit program yang meningkat dengan cepat. Eksplorasi kredit program berkenaan dengan peningkatan penerimaan negara dari minyak bumi maupun dari bantuan serta peningkatan pinjaman luar negeri.

Berkaitan dengan dana, Bank-bank milik negara menduduki posisi monopsoni dalam pasar dana karena sejak tahun 1967, dana sektor negara (instansi pemerintah, BUMN, dan BUMD) hanya boleh ditempatkan pada bank-bank milik negara (Pemerintah Pusat dan Daerah). Dana sektor negara dalam perekonomian nasional menjadi semakin dominan terutama karena adanya eksplosif penerimaan negara dari uang migas maupun dari sumber nantuan luar negeri. Begitu juga nasabah yang ingin memperoleh kredit dengan tingkat suku bunga yang disubsidi dari bank-bank, serta negara wajib menjadi nasabah (membuka rekening) pada bank-bank yang bersangkutan.

Pada dekade tersebut, Bank Indonesia menyediakan kredit likuiditas bagi pelaksana kredit program. Karena pelaksana kredit program adalah terutama bank-bank negara, maka bank-bank ini merupakan penerima utama kredit likuiditas Bank Indonesia. Pada waktu itu kebijakan tingkat suku bunga baik suku bunga giro, tabungan, deposito, serta kredit program ditentukan oleh Bank Indonesia. Tingkat suku bunga riil tabungan dan deposito diterapkan positif dan tingkat suku bunga riil kredit (prioritas) ditetapkan pada tingkat yang rendah (umumnya negatif). Bank Indonesia memberikan subsidi bagi bank-bank Pemerintah untuk melaksanakan kebijaksanaan tingkat bunga seperti itu; Karena tingkat suku bunga bukan lagi merupakan faktor penting dalam penentuan alokasi kredit, maka faktor non harga (seperti kolateral) semakin menonjol dalam menyukan alokasi kredit. Dengan perkataan lain, cara alokasi kredit program adalah seperti cara alokasi "non-transparant" pada sistem jatah. Karena pertimbangan alokasi kredit lebih menekankan pada tersedianya kolateral dan bukan *creditworthness* calon debitur, maka praktek perbankan belum banyak berbeda dari praktek rumah gadai.

Periode 1980-1990

Perkembangan ekonomi dalam dekade 1980-1990 dapat merujuk pada Studi Koesmawan, dimana pada periode tersebut menunjukkan:

1. Sektor pertanian terus memberikan kontribusi yang bertambah terhadap PDB dengan kontribusi merata antara 20-22% dan rata-rata tumbuh sebesar 3,23% lebih rendah dibanding dekade sebelumnya. Selain itu tidak terjadi lonjakan produksi dan jumlah produksi rata-rata tiap tahun mencapai Rp. 46.677,22 milyar.
2. Sektor industri, pada dekade ini tumbuh dengan pertumbuhan mencapai rata-rata 10,03%. Meskipun kecepatan pertumbuhannya melebihi sektor pertanian ternyata

antara lain pada masa ini, rata-rata perkapita sedang berada pada puncaknya, selain itu tertolong oleh harga minyak dunia yang tiba-tiba meroket pada tahun 1978, 1979 dan 1980, semula 13,40\$ per barel, naik menjadi 30,20 dan 36,70. Karena itu besar kemungkinannya karena keadaan ekonomi baik ini maka posisi Soeharto ketika itu tetap kuat, sehingga dapat diduga bahwa kekuatan pemerintahan Soeharto pada masa dekade tersebut adalah karena dukungan keadaan ekonomi yang cukup kuat. Selain itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan nilai kurs rupiah terhadap dollar yang mengambang. Nilai US\$ yang semula Rp. 415,00 per dollar di tahun 1977 berubah sedikit menjadi Rp. 442,00 tahun 1978. Tapi sesudah itu naik terus dan mencapai puncaknya menjelang kejatuhan Pak Harto pada dekade ketiga antara tahun 1991-2000.

pada dekade ini belum bisa melampaui hasil pertanian. Hal menarik adalah kontribusinya meningkat terus dari 9% sampai 14% PDB. Pada akhir dekade tepatnya tahun 1990, kontribusi sektor pertanian ternyata sama dengan sektor industri manufaktur sebesar 20%. Dengan kondisi kontribusi 20% ini terhadap PDB, maka Indonesia sudah masuk ke dalam era industrialisasi.

3. Kontribusi jasa-jasa di luar jasa hotel dan jasa perdagangan dan pertambangan relatif tetap setiap tahun yaitu antara 9-10%.
4. Kontribusi pertambangan dan penggalian, listrik, gas dan air bersih, bangunan, hotel restoran dan jasa keuangan lainnya, kontribusinya kepada PDB relatif kurang lebih 50% dari PDB dan ini sama dengan keadaan dekade sebelumnya.
5. Pendapatan per kapita terus menurun mencapai US\$822 pada tahun 1990, padahal pernah mencapai angka di atas US\$2233 pada tahun 1977. Rata-rata selama dekade ini menurun hingga US\$110,99, dan ini lebih rendah dibandingkan satu dekade sebelumnya.
6. Pertumbuhan pemberian kredit kepada swasta terus meningkat, seiring dengan gerak laju pembangunan secara umum dengan mencapai rata-rata 28,55% per tahun lebih tinggi dibanding dengan dekade sebelumnya hanya 22,16%.
7. Investasi secara nominal bertambah namun prosentase pertumbuhannya menurun terus dengan rata-rata dalam dekade ini mencapai Rp. 49,738.
8. Rata-rata upah yang tercatat mencapai angka Rp. 492.000 pada sektor pemerintah sedangkan sektor swasta antara Rp 1.805,000.

Dalam periode tersebut³ terdapat berbagai kebijakan penting yang telah diambil, yaitu: *Pertama*, tahun 1983. Pada waktu itu, Pemerintah mengeluarkan kebijakan deregulasi di sektor moneter, khususnya perbankan melalui kebijakan 1 Juni 1983 (disebut juga Pakjun). Deregulasi ini menyangkut tiga segi yaitu peningkatan daya saing bank pemerintah, penghapusan pagu kredit, dan pengaturan deposito berjangka. Dalam ketentuan itu, bank pemerintah bebas menentukan suku bunga deposito serta suku bunga kredit. Langkah ini dimaksudkan agar masyarakat yang memiliki dana nganggur tertarik untuk menyimpan di bank pemerintah. Sebab pada saat itu, suku bunga yang ditawarkan oleh bank swasta lebih tinggi ketimbang bank pemerintah, yaitu 18 persen, sementara bank pemerintah hanya 14-15 persen.

Kedua, pada Tahun 1985 pemerintah memberlakukan Inpres No. 4 Tahun 1985 yang mengalihkan tugas dan wewenang Ditjen Bea dan Cukai (BC) dalam pemeriksaan barang kepada surveyor asing SGS. Ini sama saja dengan pemerintah memberikan kepercayaan penuh kepada pihak asing (SGS) dalam memeriksa barang. Keluarnya Inpres No.4 tersebut tidak lain sebagai reaksi pemerintah atas penyalahgunaan wewenang oleh BC yang banyak diributkan oleh dunia usaha.

³ Peristiwa penting yang menonjol pada kurun waktu 1980-1990 adalah munculnya gerakan yang disebut "*Petisi 50*" yaitu protes dari para bekas pejabat di Masa Soeharto antara lain: Ali Sadikin, AM Fatwa, A.H Nasution dan lain-lain. Pada waktu itu Presiden Soeharto sangat marah sehingga melakukan tindakan-tindakan pemblokiran usaha dari para pemrotes tersebut. Ada juga peristiwa yang dampaknya tidak hilang hingga saat ini, yaitu kasus Pembantaian Tanjung Priok pada 12 September 1984. Pada dekade ini dikenal juga konsep deregulasi perbankan, yang intinya memudahkan siapapun mendirikan bank, maka tanpa diperkirakan sebelumnya di Indonesia pernah tumbuh lebih dari 200 bank dan bahkan bank yang sudah ada pun begitu mudahnya mendirikan cabang di seluruh kota-kota di Indonesia. Setelah melewati tahun 1984, terjadi penurunan harga minyak dunia, maka pemerintah mengeluarkan istilah kencangkan ikat pinggang sehingga dilakukan penghematan dalam berbagai bidang.

Ketiga, tahun 1986 mengeluarkan paket kebijakan 6 Mei (Pakem), pemerintah menghapus sertifikat ekspor (SE) yaitu fasilitas empuk yang banyak digunakan eksportir untuk memperoleh pengembalian bea masuk dan unsur subsidi, dan ini diberikan bersamaan dengan kredit ekspor.

Keempat, pada Tahun 1987 Pemerintah mengeluarkan deregulasi 15 Januari 1987, tentang industri kendaraan bermotor, mesin industri, mesin listrik, dan tarif bea masuk. Untuk bea masuk, pemerintah memberikan keringanan bea terhadap barang-barang tertentu, seperti Tekstil, kapas, dan besi baja. Sedangkan untuk industri mesin pemerintah memberikan perlakuan kemudahan ijin usaha. Untuk industri kendaraan bermotor, pemerintah memberikan kemudahan perakitan kendaraan dan pembuatan dan perakitan bagian kendaraan bermotor.

Kelima, pada Juni 1987 pemerintah mengeluarkan paket deregulasi, lewat PP Nomor 13 Tahun 1987 dan Keppres Nomor 16. Pemerintah juga menyederhanakan perijinan investasi bidang pertambangan, pertanian, kesehatan dan perindustrian, dimana semula ada empat ijin investasi menjadi dua ijin.

Keenam, pada 24 Desember 1987 pemerintah kembali membuat kejutan dengan memberikan kemudahan dan kelonggaran berusaha. Dalam bidang penanaman modal, PMA diperlakukan sama dengan PMDN dalam hal kepemilikan saham. Untuk fasilitas keringanan bea masuk, semula hanya diberikan kepada barang tertentu, kemudian diberikan keringanan bea masuk untuk semua bidang usaha yang diijinkan. Untuk ekspor, pemerintah menghapus semua perijinan ekspor dan menggantinya dengan ijin usaha. Sementara perusahaan asing yang sudah memproduksi dan bisa ekspor, diijinkan untuk membeli hasil produksi perusahaan lain untuk di ekspor. Sedangkan bidang ekspor, PT Kratau Steel yang selama itu ditunjuk sebagai pelaksana 92 komoditi produk industri logam, dengan kebijakan baru hak impornya hanya tinggal 50 komoditi. Untuk bidang pariwisata yang semula ada 33 jenis ijin, dikurangi tinggal dua ijin.

Ketujuh, pada tahun 1988 dikeluarkan kebijakan perbankan. Inilah tahun *booming* dunia perbankan Indonesia. Hanya dengan modal Rp 10 milyar, seorang pengusaha punya pengalaman atau tidak sebagai bankir, sudah bisa mendirikan bank baru. Karena itu berbagai macam bentuk dan nama bank baru bermunculan bagai jamur di musim hujan. Itulah salah satu bentuk kebijakan deregulasi 27 Oktober 1988, atau yang dikenal dengan sebutan Pakto 88. Tak hanya itu, bank asing yang semula hanya beroperasi di Jakarta, dapat merentangkan sayapnya ke daerah lain di luar Jakarta. Sementara untuk mendirikan bank perkreditan, modal yang disetor menurut Pakto 88, hanya Rp 50 juta.

Kedelapan, pada 21 November 1988, pemerintah kembali mengeluarkan paket deregulasi, yang berisi pengikisan berbagai rintangan yang selama ini malang-melintang di sekitar arus distribusi barang dan angkutan laut, pemudahan distribusi arus barang produk pabrik-pabrik modal asing, penurunan bea masuk bahan baku plastik dari 30-60 persen menjadi 5 persen. Lalu, terhadap kritikan monopoli PT Krakatau Steel, lewat paket November ini, pemerintah membat 26 jenis tarif pos. Dengan penghapusan itu, pabrik-pabrik boleh impor besi baja untuk pengecoran, yang selama ini dikuasai oleh buatan pabrik baja di Cilegon.

Periode 1990-2000

Perkembangan ekonomi dalam dekade 1990-2000 dapat merujuk pada Studi Koesmawan, dimana pada periode tersebut menunjukkan:

1. Sektor pertanian tetap memberikan kontribusi kepada PDB namun turun terus - 0,55 dan terjadi penurunan drastis produksi tahun 2000 menjadi -29,28%. Namun jumlah produksi rata-rata tiap tahun tetap lebih tinggi yaitu mencapai Rp. 61.646,68 milyar.
2. Sektor industri tumbuh dengan pertumbuhan mencapai rata-rata menurun menjadi 0.15% saja, namun pada dekade ini, kontribusi dari sektor industri sudah di atas sektor pertanian.
3. Kontribusi jasa-jasa di luar jasa hotel dan jasa perdagangan dan pertambangan relatif tetap setiap tahun yaitu antara 9-10% dan berlaku terus hingga akhir periode pengamatan tahun 2000.
4. Kontribusi pertambangan dan penggalian listrik, gas dan air bersih, bangunan, hotel restaurant dan jasa keuangan lainnya, kontribusinya kepada PDB relatif kurang lebih 50% dari PDB dan bertahan hingga akhir tahun 2000.
5. Pendapatan per kapita terus melemah hingga rata-rata mencapai rata-rata 651,43US\$ per tahun dan mencapai titik terendah sebesar US\$184.
6. Pertumbuhan pemberian kredit kepada swasta menurun hingga rata-rata hanya Rp. 277.947 milyar.
7. Investasi secara nominal bertambah hingga tahun 1997, namun seiring dengan terjadinya krisis, maka angkanya menurun tajam dari Rp. 139.725,20 di tahun 1997 menjadi hanya Rp. 93.624,30 pada tahun 1998.
8. Rata-rata upah yang tercatat mencapai angka Rp. 6.322.000 untuk pemerintah sedangkan swasta antara Rp. 2.000.000.

Pada periode tersebut⁴ terdapat peristiwa yang menonjol yaitu keadaan awal 1990 dimana ekonomi Indonesia tergolong dalam keadaan baik dan pertumbuhan rata-rata 6% setiap tahunnya. Beberapa catatan ekonomi antara lain terjadi penurunan pertumbuhan baik di sektor pertanian, industri dan jasa, pada tahun 1998 sebagai akibat krisis moneter yang terjadi di pertengahan Juli 1997. Begitu juga posisi PDB per kapita pada tahun 1998, berada pada titik yang terendah dengan nilai US\$184. Sementara kredit perbankan kepada dunia swasta betul-betul dipangkas sehingga terjadi penurunan mencapai -54%. Dalam periode tersebut terdapat berbagai kebijakan penting yang telah diambil, yaitu: *Pertama*, tahun 1990 pemerintah membuat gebrakan di sektor moneter, khususnya perbankan, lewat Paket Januari 1990 (Pakjan 90), bank-bank umum wajib mengalokasikan 20 persen dari total kreditnya, kepada pengusaha lemah atau maksimal kredit yang diberikan kepada pengusaha lemah Rp 200 juta. Namun, dalam Pakjan 90 ini yang masuk kategori usaha lemah adalah usaha yang beraset maksimal Rp 600 juta.

Kedua, pada Mei 1990 pemerintah kembali mengeluarkan paket deregulasi yang menyangkut empat sektor pembangunan: industri, perdagangan, kesehatan, dan pertanian. Dari empat sektor yang disentuh deregulasi itu, sektor otomotif, impor gandum, kelapa sawit, dan bahan baku plastik belum masuk dalam cacatan deregulasi yang dinamai Pakmei 90 itu. Untuk bidang pertanian dibebaskan dari tata niaga atas komoditas pala, sayur-sayuran dari Sumatera Utara, tengkawang, kayu manis, serta kopi. Lalu untuk bidang perijinan, satu ijin peternakan berlaku untuk semua jenis ternak, beternak,

⁴ Pada periode ini juga terjadi peristiwa yang menonjol adalah perang Irak. Namun dampaknya terasa pada penurunan harga minyak dunia dan ini mengganggu perekonomian Indonesia dan akhirnya secara menyeluruh terjadi penurunan pendapatan per kapita. Peristiwa yang sangat penting dalam dekade ini bagi bangsa Indonesia yaitu terjadinya perubahan kekuasaan dari Presiden Soeharto ke Presiden Habibie dan kemudian Presiden Abdurrahman Wahid.

pemotongan hewan, dan produksi hewan. Bidang kesehatan, terjadi penyerdehanaan ijin usaha untuk industri farmasi, perdagangan besar farmasi, apotek, industri obat, pendaftaran obat, tata niaga impor, dan bahan baku obat. Sementara untuk perdagangan terjadi pengurangan dan penambahan pos baru. Pengurangan terjadi dari 9.549 menjadi 9.250 pos tarif dan terdapat penambahan 387 pos baru.

Ketiga, pada Juni 1991 pemerintah kembali "meluncurkan" serangkaian paket deregulasi bidang: investasi, industri, pertanian, perdagangan, dan keuangan. Inti dari deregulasi kali ini adalah pembabatan hak monopoli enam persero pemerintah (Pantja Niaga, Kertas Niaga, Dharma Niaga, Mega Eltra, Sarinah, dan Krakatau Steel. Khusus untuk baja, KS harus rela melepaskan 60 hak impornya kepada importir produsen. Sementara untuk makanan, buah-buahan, dan daging, pengencer di dalam negeri bebas mengimpor dari luar negeri. Namun, importir terkena bea masuk 20 persen. Untuk otomotif, pemerintah membuka keran impor kendaraan niaga kategori I sampai V dan termasuk kendaraan serba guna (jip). Namun, yang boleh mengimpor hanyalah para agen tunggal dan importir yang ditunjuk (enam persero pemerintah). Bukti paling dramatis akibat deregulasi ini, adalah dibukanya keran impor kendaraan truk, harga truk anjlok.

Keempat, pada 6 Juli 1992, pemerintah kembali mengeluarkan paket deregulasi di bidang investasi, perdagangan, keuangan, tenaga kerja, pertanahan, IMB dan UUG/HO. Berisi antara lain, mengizinkan HGU dan HGB oleh usaha patungan dalam rangka penanaman modal asing dalam jangka waktu 30 tahun. Keputusan lainnya dari deregulasi yang dinamakan Pakjul itu, pembebasan tata niaga terhadap 241 pos tarif. Terdiri atas 226 pos tarif mengenai batik, 12 pos tarif pertanian, 1 pos tarif air mineral, 1 pos tarif produk logam, dan 1 pos tarif transformator listrik. Untuk bea masuk hanya diberikan kepada 36 pos tarif besi baja. Sementara untuk impor mesin bukan baru hanya dapat diimpor oleh perusahaan sendiri atau industri rekondisi. Mengenai tenaga kerja asing, dengan deregulasi itu, untuk memperoleh ijin tidak perlu ada rekomendasi dari departemen teknis.

Kelima, pada tahun 1993, pemerintah mengeluarkan kebijakan di sektor moneter kembali disentuh melalui deregulasi Mei 1993 (Pakmei 93). Melalui Pakmei, *capital adequacy ratio* (CAR) atau rasio kecukupan modal diperlonggar. Dengan peningkatan CAR, bank dipastikan akan lebih leluasa memberikan kredit. Pemerintah juga menyederhanakan ketentuan *loan deposit ratio* (LDR) atau pemberian kredit kepada pihak ketiga. Dengan ketentuan ini bank hanya diberikan 20 persen untuk menyalurkan kredit kepada grupnya sendiri. Yang menarik dari kebijakan ini, KUK dibawah Rp 25 juta dapat digunakan untuk kegiatan tidak produktif.

Keenam, 10 Juni 1993 pemerintah kembali mengeluarkan paket deregulasi di bidang otomotif. Sejumlah bea masuk yang dianggap menghambat pengembangan industri otomotif, dipangkas. Untuk kategori sedan, jika kandungan lokal telah mencapai 60 persen maka akan dikenakan bea masuk nol persen. Pick-up, minibus, dengan kandungan lokal 40 persen akan dikenakan bea masuk nol persen. Sedangkan untuk truk, bus, dan sepeda motor, masing-masing akan dikenakan nol persen jika mencapai kandungan lokal lebih dari 30 dan 40 persen. Pemerintah juga membuka keran impor kendaraan bermotor dalam bentuk utuh (build-up) dari negara lain. Jika kendaraan impor sudah dirakit di dalam negeri maka pemerintah akan mengenakan bea masuk 200 persen. Sedangkan yang belum pernah dirakit di dalam negeri pemerintah mengenakan 300 persen bea masuk. Selain otomotif pemerintah juga membuat kejutan

dengan menarik tepung terigu dari daftar negatif investasi (DNI). Dengan begini, investor yang berminat di tepung terigu punya peluang untuk membangun pabriknya.

Ketujuh, tahun 1994 melalui PP Nomor 20 Tahun 1994, pemerintah membuka pintu lebar-lebar kepada PMA untuk "menabur" duitnya disegala bidang dan sektor ekonomi. Bahkan sektor yang banyak berhubungan dengan hajat hidup orang banyak terbuka 95 persen bagi PMA. Dalam patungan membangun perusahaan dengan mitra lokal, sebelum PMA hanya diberikan 45 persen saham, dengan PP itu, PMA bisa menguasai 95 persen saham. Mungkin inilah satu-satunya deregulasi yang membuat Menteri Penerangan Harmoko, marah. Pasalnya, ia merasa tidak diajak konsultasi guna penyusunan PP tersebut. Maklum saja, PP Nomor 20 dinilai banyak bertentangan dengan UU Pokok Pers Tahun 1982. Belakangan beleid mengenai PMA ini dikoreksi, sehingga ada beberapa sektor yang "haram" dimasuki oleh PMA, seperti bidang pers salah satunya.

Kedelapan, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang dinamakan Paket Mei 1995 (Pakmei 95), pemerintah mengeluarkan paket deregulasi atas lima bagian : tarif bea masuk dan masuk tambahan, tata niaga impor, penanaman modal, perijinan, restrukturisasi usaha, dan entrepot produsen tujuan ekspor serta kawasan berikat. Dalam tarif, terjadi penurunan 6.030 dari 9.408 pos tarif. Pemerintah juga menghapus bea masuk tambahan terhadap 95 produk, merubah tata niaga dan kontrol terhadap 81 produk. Dalam Pakmei ini, penurunan tarif bea masuk akan diturunkan secara bertahap.

Kesembilan, pada 26 Januari 1996, pemerintah mengeluarkan paket deregulasi, untuk bidang industri, perdagangan, dan keuangan. Makna deregulasi kali ini masih tidak bergeser dari deregulasi sebelumnya, yaitu penurunan bea masuk. Selain itu diberikannya fasilitas perpajakan guna meningkatkan ekspor non migas.

Kesepuluh, 4 Juni 1996 p pemerintah kembali mengeluarkan 11 langkah kebijakan deregulasi. Meliputi : (1) penjadwalan penurunan tarif bea masuk, (2) perubahan tarif bea masuk barang modal, (3) penghapusan bea masuk tambahan, (4) penyederhaan tata niaga impor, (5) ketentuan anti-dumping, (6) kemudahan ekspor, (7) kemudahan layanan eksportir tertentu untuk bidang tertentu, (8) penyederhanaan perijinan industri di kawasan industri, (9) penyelenggaraan tempat penimbunan, (10) kelonggaran kegiatan ekspor-impor bagi perusahaan PMA manufaktur, (11) penyederhanaan prosedur impor limbah untuk bahan baku industri. Untuk penurunan tarif bea masuk, telah ditrunkan sebanyak 1.497 pos tarif dari 7.288 pos tarif.

Dalam rangka menghadapi praktek anti-dumping dan melindungi industri dalam negeri, pemerintah memberlakukan PP tentang bea masuk anti dumping dan bea masuk imbalan. Untuk itu pemerintah membentuk Komite Anti Dumping Indonesia (KADI). Sementara untuk mendorong ekspor, pemerintah menghapus kewajiban penggunaan PEB dari Rp 10 juta menjadi Rp 100 juta. Pemerintah juga menyederhanakan perijinan kawasan berikat. Bagi perusahaan yang telah bermukim di kawasan industri tidak diwajibkan memiliki perijinan selama memperoleh persetujuan PMA dari presiden , atau dari BKPM untuk PMDN.

Kesebelas, di Juli 1997 mengeluarkan paket deregulasi: pemangkasan 1.600 pos tarif bea masuk untuk berbagai produk sektor pertanian, perdagangan dan kesehatan. Deregulasi yang dikeluarkan 7 Juli 1997 itu, diikuti juga dengan peraturan pemerintah (PP) mengenai penerimaan pajak dan retribusi daerah, dan pembatasan pemberian kredit oleh bank untuk pengadaan dan pengolahan tanah. Penurunan tarif terbesar terjadi

pada produk industri sebanyak 1.461 pos tarif, pertanian 136 pos tarif, dan kesehatan tiga pos tarif. Jumlah pos tarif sebanyak 7.261 sebelum tahun 1997, dan setelah deregulasi jumlah pos tarif masih sama. Perubahannya, hanya pada pos tarif rendah jumlahnya bertambah, terutama untuk pos tarif 20 persen hingga nol persen. Sementara sebelum deregulasi, jumlah pos tarif tinggi masih banyak. Dengan penambahan bea masuk rendah dan berkurangnya pos tarif tinggi, maka pos tarif rata-rata tidak tertimbang mengalami penurunan dari 13,0 persen menjadi 11,9 persen.

Dalam paket Juli ini, untuk bidang impor, pemerintah memberlakukan ketentuan impor gula kasar, yang sebelumnya dikuasai oleh Badan Urusan Logistik (Bulog), kini dapat dilakukan oleh importir produsen. Importir dalam hal ini, adalah pabrik gula yang menggunakan bahan baku gula kasar untuk produksinya. Selain itu, pemerintah juga membuka impor kapal bekas tanpa ada batasan kuota. dengan ketentuan selama kapal bekas masih layak pakai. Untuk bidang ekspor, pemerintah menaikkan nilai pemberitahuan ekspor barang (PEB) yang sebelumnya Rp 100 juta naik menjadi Rp 300 juta. Dalam ketentuan baru ini, para pengusaha kecil dan menengah yang sebelum harus melapor jika akan mengekspor barang dengan nilai di atas Rp 100 juta, kini, mengekspor barang hingga Rp 300 juta tanpa PEB. Sementara untuk perusahaan bukan penanaman modal, yang sebelumnya tidak mendapat fasilitas pembebasan bea masuk, seperti penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN), kini mendapatkan fasilitas yang sama. Kebijakan pemberian fasilitas pembebasan bea masuk untuk bebas bea atas impor barang modal dan bahan baku, untuk keperluan selama dua tahun.

Sedangkan untuk pajak dan retribusi daerah, sebagai pelaksanaan UU No. 18 Tahun 1997, pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah (PP) No.19 Tahun 1997, tentang pajak daerah dan PP No.20 Tahun 1997, tentang retribusi daerah, guna penyederhanakan kedua pungutan tersebut. Kini dengan adanya UU, pajak daerah yang sebelum sebanyak 42 jenis, kini tinggal 9 jenis. Sedangkan untuk retribusi daerah dari 192 jenis menjadi 30 jenis. Selain itu, sebagai pelaksanaan dari UU No.20 Tahun 1997 tentang penerimaan negara bukan pajak (PNBP), pemerintah mengeluarkan PP No.22 Tahun 1997, yang mengatur semua penerimaan negara bukan pajak harus disetorkan ke kas negara.

Dalam PP No. 22, disebutkan ada tujuh jenis penerimaan negara bukan pajak di semua departemen dan lembaga non departemen. Antara lain, penerimaan kembali anggaran (sisa anggaran rutin dan pembangunan), penerimaan hasil penjualan barang milik negara, hasil penyewaan barang milik negara, penerimaan hasil jasa giro uang negara, penerimaan ganti rugi atas kerugian negara, penerimaan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah, dan penerimaan dari hasil penjualan dokumen lelang. Selain itu, PP No.22 juga mengatur semua jenis penerimaan negara bukan pajak di seluruh departemen dan lembaga non departemen.

Di bidang moneter, khususnya perbankan, pemerintah melarang bank umum untuk memberikan kredit baru untuk pengadaan dan pengolahan lahan. Dengan kata lain, bank-bank tidak diperkenankan memberikan kredit kepada pengembang untuk membuka lahan baru. Kecuali untuk pengadaan rumah sederhana (RS) dan sangat sederhana (RSS). Sementara impor minyak kelapa sawit mentah untuk bahan baku minyak goreng, yang semula dikenakan pajak ekspor sebesar 10-12 persen, kini dengan ketentuan baru pemerintah menurunkan jadi lima persen.

Masa Reformasi

Pada masa krisis ekonomi, ditandai dengan berakhirnya pemerintahan Orde Baru kemudian disusul dengan era reformasi yang dimulai oleh pemerintahan Presiden Habibie. Pada masa ini tidak hanya hal ketatanegaraan yang mengalami perubahan, namun juga kebijakan ekonomi. Sehingga apa yang telah stabil dijalankan selama 32 tahun, terpaksa mengalami perubahan guna menyesuaikan dengan keadaan. Pemerintahan presiden BJ.Habibie yang mengawali masa reformasi belum melakukan manuver-muver yang cukup tajam dalam bidang ekonomi. Kebijakan-kebijakannya diutamakan untuk mengendalikan stabilitas politik.

Pada masa kepemimpinan presiden Abdurrahman Wahid pun, belum ada tindakan yang cukup berarti untuk menyelamatkan negara dari keterpurukan. Padahal, ada berbagai persoalan ekonomi yang diwariskan orde baru harus dihadapi, antara lain masalah KKN, pemulihan ekonomi, kinerja BUMN, pengendalian inflasi, dan mempertahankan kurs rupiah. Malah presiden terlibat skandal Bruneigate yang menjatuhkan kredibilitasnya di mata masyarakat. Akibatnya, kedudukannya digantikan oleh presiden Megawati.

Pada masa kepemimpinan Megawati Soekarnoputri mengalami masalah-masalah yang mendesak untuk dipecahkan adalah pemulihan ekonomi dan penegakan hukum. Kebijakan-kebijakan yang ditempuh untuk mengatasi persoalan-persoalan ekonomi antara lain:

1. Meminta penundaan pembayaran utang sebesar US\$ 5,8 milyar pada pertemuan Paris Club ke-3 dan mengalokasikan pembayaran utang luar negeri sebesar Rp 116.3 triliun.
2. Kebijakan privatisasi BUMN. Privatisasi adalah menjual perusahaan negara di dalam periode krisis dengan tujuan melindungi perusahaan negara dari intervensi kekuatan-kekuatan politik dan mengurangi beban negara. Hasil penjualan itu berhasil menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,1 %. Namun kebijakan ini memicu banyak kontroversi, karena BUMN yang diprivatisasi dijual ke perusahaan asing. Di masa ini juga direalisasikan berdirinya KPK, tetapi belum ada gebrakan konkrit dalam pemberantasan korupsi. Padahal keberadaan korupsi membuat banyak investor berpikir dua kali untuk menanamkan modal di Indonesia, dan mengganggu jalannya pembangunan nasional.

Masa Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono terdapat kebijakan kontroversial yaitu mengurangi subsidi BBM, atau menaikkan harga BBM. Kebijakan ini dilatar belakangi oleh naiknya harga minyak dunia. Anggaran subsidi BBM dialihkan ke subsidi sektor pendidikan dan kesehatan, serta bidang-bidang yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan kontroversial pertama itu menimbulkan kebijakan kontroversial kedua, yakni Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin. Kebanyakan BLT tidak sampai ke tangan yang berhak, dan pembagiannya menimbulkan berbagai masalah sosial. Kebijakan yang ditempuh untuk meningkatkan pendapatan perkapita adalah mengandalkan pembangunan infrastruktur massal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mengundang investor asing dengan janji memperbaiki iklim investasi. Salah satunya adalah diadakannya *Indonesian*

Infrastructure Summit pada bulan November 2006, yang mempertemukan para investor dengan kepala-kepala daerah.

Tabel.6.1. Perkembangan Indikator Makro 2005-2009

Fungsi	2005	2006	2007	2008	2009
Pertumbuhan ekonomi (%)	5,7	5,5	6,3	6,1	4,3
Inflasi (5)	7,1	6,6	6,6	11,1	5,0
Kurs US\$	9.705	9.164	9.140	9.691	10.600

Sumber: <http://www.depkeu.go.id>

Pada pertengahan bulan Oktober 2006, Indonesia melunasi seluruh sisa utang pada IMF sebesar 3,2 miliar dolar AS dengan harapan Indonesia tak lagi mengikuti agenda-agenda IMF dalam menentukan kebijakan dalam negeri. Namun wacana untuk berhutang lagi pada luar negeri kembali mencuat, setelah keluarnya laporan bahwa kesenjangan ekonomi antara penduduk kaya dan miskin menajam, dan jumlah penduduk miskin meningkat dari 35,10 jiwa di bulan Februari 2005 menjadi 39,05 juta jiwa pada bulan Maret 2006. Hal ini disebabkan karena beberapa hal, antara lain karena pengucuran kredit perbankan ke sektor riil masih sangat kurang (perbankan lebih suka menyimpan dana di SBI), sehingga kinerja sektor riil kurang dan berimbas pada turunnya investasi. Selain itu, birokrasi pemerintahan terlalu kental, sehingga menyebabkan kecilnya realisasi belanja Negara dan daya serap, karena inefisiensi pengelolaan anggaran. Jadi, di satu sisi pemerintah berupaya mengundang investor dari luar negeri, tapi di lain pihak, kondisi dalam negeri masih kurang kondusif.